

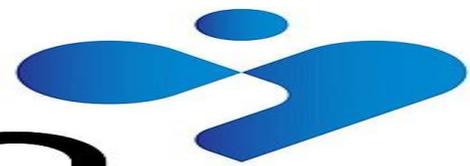
## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Profil DPPKB Tahun 2022 selesai di susun profil DPPKB menggunakan data Lapangan yang menggambarkan situasi dan kondisi Boven Digoel. Data-data yang dikumpulkan bentuk table, grafik, gambar dan narasi yang menunjukkan pencapaian hasil kegiatan DPPKB indikator yang telah ditetapkan. Profil DPPKB juga menggambarkan Sumber Daya, Sarana dan SDM di Kabupaten Boven Digoel pada satu tahun. Profil disusun dari Bidang-bidang dan seksi. Kontribusi ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan di Boven Digoel.

Laporan ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, masukan dan kritik sangat diperlukan untuk penyempurnaan profil pada periode berikutnya, disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan peran aktif dalam penyusunan dan penyelesaian Profil tahun 2022

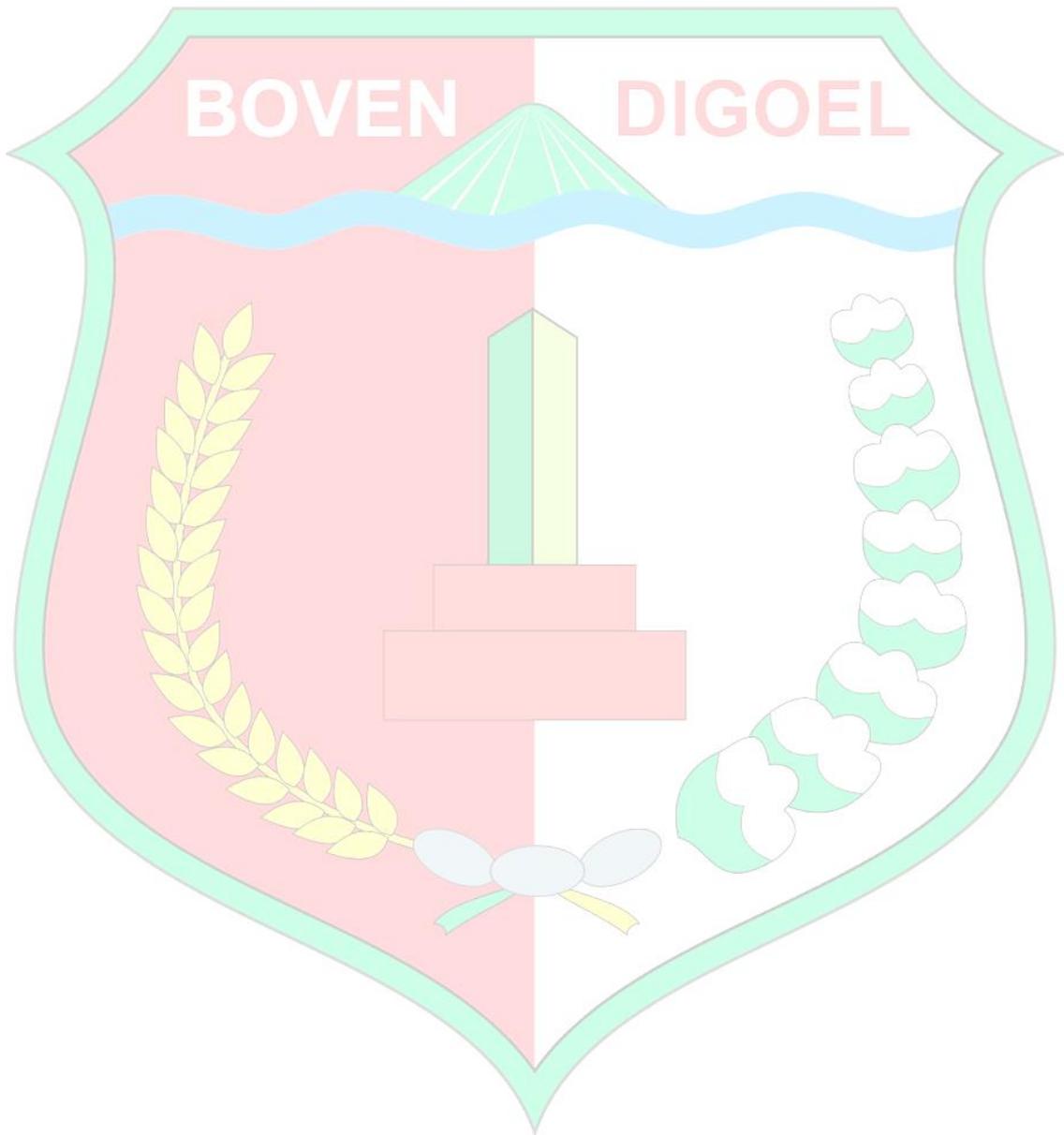
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB  
Kabupaten Boven Digoel

dr. Viviana Maharani Pradotokoesoemo, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640917 199503 2 001



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>5</b>
A.Keadaan umum.....	5
A.1 Luas Wilayah.....	5
A.2 Kemiringan.....	5
A.3 Jumlah Penduduk.....	5
A.4 Pendidikan.....	6
A.5 Administrasi Pemerintahan.....	6
<b>BAB III PENCAPAIAN PROGRAM 2022.....</b>	<b>7</b>
A. Fasilitas keluarga berencana .....	7
B. Pelayanan KB di Kampung KB .....	7
C. Keadaan pemakaian Obat .....	11
D. Sumber Dana .....	11
<b>BAB IV SUMBER DAYA.....</b>	<b>12</b>
A. Sarana.....	12
B. Fasilitas.....	13
C. Tenaga.....	14
<b>BAB V BIAYA ANGGARAN.....</b>	<b>17</b>
A. Biaya.....	17
B. Anggaran.....	19
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>20</b>
A. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Bidang-Bidang Th. 2023.....	21



## BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang keuangan daerah , sertaperaturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi, maka kewenangan pelaksanaan pengembangan sebagian besar telah di limpahkan ke propinsi dan kabupaten / kota. Kewenangan tersebut meliputi kebijakan serta perencanaan , penggerakan , pelaksanaan dan evaluasi.

Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) saat ini tengah semarak berkiprah di tengah masyarakat. Berbagai program didisain untuk sepenuhnya berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Papua ( Orang Asli Papua). Melalui pengarusutamaan program KKBPK , kementerian / lembaga pemerintah Daerah, masyarakat dan bahkan dunia internasional sedang melirik kemajuan dan turut andil dalam membangun program KKBPK, semangat untuk menghadirkan negara dalam urusanyang melibatkan hajat hidup orang banyak , mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan membangun dari pinggiran serta menghijrahkan mental bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik merupakan bagian dari nawa cita yang ingin diwujudkan melalui pembangunan program KKBPK.Dengan mengusung, mencanangkan dan membangun kampung KB, diharapkan masyarakat menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat hasil pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari kegiatan terobosan kampung KB. Masyarakat dengan kapasitasnya di buat mampu untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan isu kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keluarga Indonesia mengadopsi pola pendekatan keluarga sesuai dengan siklus kehidupan yang secara ekonomi dapat berdikari, merencanakan kehidupan berkeluarga yang sehat dan mandiri serta keluarga yang turut membangun untuk lingkungannya, bangsa dan negaranya. Dengan semangat dan arah pembangunan yang telah ditetapkan, tidak dapat ditampikkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program KKBPK. Esensi program KKBPK belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat termasuk para pimpinan daerah yang lebih menyukai dan fokus pada pembangunan infrastruktur/fisik.

Program KKBPK di anggap sebagai program dengan nilai investasi yang membutuhkan waktu lama untuk membuahkan hasil. Pemahaman ini mendasari minimnya komitmen hampir seluruh pemerintah daerah untuk serius membangun program KKBPK dan masyarakat lebih menerima pimpinan yang memberikan akses jalan dan rumah daripada mengajak mereka untuk membangun ketahanan keluarganya.

Pembangunan infrastruktur pasti dibutuhkan selama masih ada penduduk yang mendiami suatu daerah namun tidak menjadi tujuan akhir dari cita-cita pembangunan. Pembangunan fisik dibutuhkan ketika konsep pembangunan program KKBPK dengan blue printnya secara komperhensif telah di rancang. Pembangunan fisik bertujuan untuk memberikan akses terjadinya pembangunan manusia yang lebih fundamental sebagai tujuan akhir. Selaras dengan upaya membumikan program KKBPK di lini terbawah , pemerintah telah melakukan sejumlah terobosan. Terobosan yang cukup menggembirakan adalah memastikan biaya operasional melalui transfer dana ke daerah yang di mulai dari tahun 2016 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat secara signifikan di tingkatkan pada tahun anggaran berikutnya.

Menu yang disediakan untuk pemanfaatan bantuan operasional sub bidang KB atau yang di kenal dengan biaya operasional KB (BOKB) juga bertambah dan beragam. Sebelumnya BOKB mendanai sejumlah kegiatan di balai penyuluhan, distribusi alat dan obat kontrasepsi serta integrasi kampung KB. Pada tahun 2021 menu BOKB bertambah lagi, yaitu mendanai kegiatan Stunting secara nasional. Salah satu tujuan program Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) menuju keluarga sejahtera tahun 2022 adalah menguatkan akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan pola pendekatan kesehatan reproduksi dan pengaturan jarak kelahiran melalui program 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan Stunting. Dalam usahanya mewujudkan program KKBPK yang berkesinambungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap program KKBPK di daerah, dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Program KKBPK didalam RKP tahun 2022 berada pada lingkup Prioritas Nasional Pembangunan kesehatan, sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki kontribusi pada pembangunan kesehatan melalui Tugas utamanya lima Kegiatan:

1. Pelayanan Keluarga Berencana,
2. Advokasi dan KIE KKBPK
3. Pembinaan Remaja

#### 4. Pembangunan Keluarga (Pencegahan Stunting)

5. Regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi, sehingga dari tugas ini diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat secara paripurna. Profil DPPKB merupakan salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan yang penyusunan dan penyajiannya dibuat sesederhana mungkin tetapi informatif, untuk dipakai sebagai alat tolak ukur kemajuan program KKBPK sekaligus juga sebagai bahan evaluasi program-program keluarga berencana. Profil DPPKB Kabupaten Boven Digoel adalah gambaran situasi pelayanan KKBPK yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pelayanan kesejahteraan keluarga selama satu tahun yang memuat data pelayanan KB, sumber daya pelayanan KB, dan capaian indikator hasil pelayanan KB. Guna mendukung program pembangunan kependudukan KB dan Keluarga (KKBPK) di daerah Kabupaten Boven Digoel sesuai asas otonomi daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dituntut untuk mampu meningkatkan Program KKBPK semaksimal mungkin.

#### A. Tujuan

##### 1. Umum

Profil pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Boven Digoel ini bertujuan untuk memberikan gambaran Pelayanan program KKBPK yang menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen secara berhasil guna dan berdayaguna.

##### 2. Khusus

- a. Diperolehnya data dan informasi pembangunan di lingkungan kabupaten Boven Digoel yang meliputi : data lingkungan fisik / biologi, perilaku kesehatan masyarakat, pelayanan KKBPK, data demografi dan sosial ekonomi
- b. Diperolehnya data dan informasi tentang upaya KKBPK di kabupaten Boven Digoel yang meliputi : cakupan kegiatan dan sumber daya pelayanan keluarga berencana.
- c. Diperolehnya data dan informasi status pelayanan KKBPK di masyarakat kabupaten Boven Digoel yang meliputi : kesejahteraan keluarga, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- d. Tersedianya wadah integrasi berbagai data yang telah dikumpulkan oleh berbagai system pencatatan dan pelaporan yang ada di mitra pelayanan seperti Rumah Sakit, Klinik Praktek Dokter, Bidan, Puskesmas maupun pelayanan kesehatan lainnya.

## B. Manfaat

Dengan disusunnya profil dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) kabupaten Boven Digoel diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan administrasi pelayanan keluarga berencana dan unit-unit lain yang memerlukan. Penggunaan profil ini terutama dalam rangka tinjauan / revisi tahunan, kondisi pelayanan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di masyarakat di kabupaten Boven Digoel dan sebagai alat evaluasi program tahunan yang telah dilaksanakan, untuk menyusun rencana tahunan DPPKB tahun berikutnya. Manfaat lain adalah memberikan umpan balik / gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PLKB, sub PPKBD dan para kader KB, BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA di Kampung KB dan juga Mitra yang ada di Boven Digoel



## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Keadaan Umum

#### A.1 Luas Wilayah

luas wilayah : 27.108.29Km<sup>2</sup>. Kabupaten Boven Digoel terdiri dari 20 Distrik yaitu Distrik Jair,Subur,Ki,Mindiptana,Iniyandit,Kombut,Sesnukt,Mandobo,Fofi,Arimop,Kouh,Bomakia,Firiwage,Manggalum,Yaniruma,Kawagit,Kombay,Waropko,Ambatkwi,dan Distrik Ninati.

Dari dua puluh distrik yang terdapat di kabupaten Boven Digoel ,empat distrik diantaranya berbatsan langsung dengan Negara PNG antara lain Distrik Jair,Kombut,Waropko,dan Ninati.

Letak Geografi wilayah Kabupaten Boven Digoel antara 139,90° - 141 ° BT dan 4,98 - 7,10 LS dengan batas wilayah :

Sebelah Utara :Kab.Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang  
Sebelah Timur : Papua New Guinea  
Sebelah Selatan : Kabupaten Merauke  
SebelahBarat : Kabupaten Mappi

#### A.2 Kemiringan

Dataran Kabupaten Boven Digoel terdiri dari :

Boven Digoel memiliki ketinggian berkisar antara 19 sampai 125 meter di atas permukaan

laut ( mdpl).Wilayah kabupaten Boven Digoel merupakan wilayah dengan kemiringan tanah yangberaneka ragam mulai dari wilayah datar hingga bergunung-gunung. Sebagian besar wilayah yakni sebesar 61,11 % dari total wilayah berada pada kemiringan 2-8 % atau merupakan wilayah agak datar dan berombak.

#### A.3 Jumlah Penduduk

Data penduduk Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- i. Jumlah penduduk : 63.868 jiwa
- ii. Pembagian Penduduk menurut jenis kelamin :
  1. Penduduk laki-laki : 33.865 jiwa
  2. Penduduk Perempuan : 30.010 jiwa

## A.4 Pendidikan

**Tabel 2. 1**

JENIS KELAMIN	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TK	Total
Perempuan	523	174	35	293	2	3	-	1030
Laki-laki	675	106	43	504	22	25	-	1375

## A.5 Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan pembagian daerah administratifnya, Kabupaten Boven Digoel terdiri atas 20 distrik , 112 kampung . Dilihat dari letak geografis, geologis dan pembagian wilayah administratif. Kabupaten Boven Digoel merupakan sumber potensi yang baik untuk pembangunan program pertanian dan ekonomi , karena terletak pada delta jalur raya ekonomi di wilayah selatan papua.

**BAB III**  
**PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN 2022**

**A. Pelayanan Keluarga berencana Di Kampung KB**

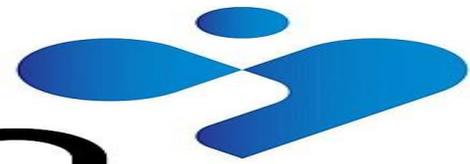
Kampung KB perdana adalah Kampung Mawan ,kemudian Kampung Naga,Gingimop,Autriop,Kamka,Tembutka,Winiktit,Amuan,Kouh,Makmur,Somi,Wangge malo,Manggemahe,Biwage II, Manggatiga,Karuwage,Ki,Watemu,Aiwat DPPKB bekerjasama dengan PKK,Dinkes, kabupaten Boven Digoel juga OPD terkait lainnya dengan Posyandu dan posyandudiselenggarakan untuk kepentingan masyarakat sehingga pembentukan, penyelenggaraan dan pemanfaatannya memerlukan peran serta aktif masyarakat dalam bentuk partisipasi penimbangan balita atau lansia setiap bulannya, sehingga dapat meningkatkan status gizi balita atau lansia. Posyandu terdiri dari 2 yaitu Posyandu Balita dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat. Satu posyandu melayani sekitar 80-100 balita. Dalam keadaan tertentu, seperti lokasi geografis, perumahan penduduk yang terlalu berjauhan, dan atau jumlah balita lebih dari 100 orang, dapat dibentuk posyandu baru (Depkes RI, 2006). Sedangkan Posyandu lansia adalah posyandu untuk masyarakat lanjut usia di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat dimana lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Kabupaten Boven Digoel sendiri memiliki 105 Posyandu Balita dan 15 Posyandu Lansia yang tersebar di 20 distrik. Dan juga 20 Puskesmas. Sedangkan untuk di ibukota Kabupaten sendiri yaitu distrik Mandobo memiliki 15 Posyandu Balita dan Posyandu Lansia. Posyandu -Posyandu tersebut dikelola oleh Masyarakat, PKK dan dibantu oleh Petugas Puskesmas dan juga DPPKB. Pada Tahun 2022 Kegiatan DPPKB Kabupaten Boven Digoel diantaranya:

**Tabel 3.1 Program Kegiatan Tahun 2022**

NO	BIDANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Sekretariat	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

			<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kinerja perangkat daerah</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</li> <li>Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>Penyediaan Bahan logistic kantor</li> <li>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</li> <li>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan</li> <li>Penyelenggaraan Rapat kordinas dan konsultasi SKPD</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik</li> <li>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dan dinas jabatan</li> <li>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan</li> <li>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</li> </ol>

2.	Program Pengendalian Penduduk	<p>1. Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p>	<p>1. Penyusunan dan pemanfaatan Grand design pembangunan kependudukan/GDPK) tingkat kabupaten/kota</p> <p>2. Pelaksanaan survey/pendataan Indeks Pengetahuan masyarakat tentang kependudukan</p>
		<p>2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penyediaan dan pengolahan data kependudukan</p> <p>2. Penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga</p>
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	<p>1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</p>	<p>1. Advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja</p> <p>2. Komunikasi informasi dan edukasi/KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya local</p> <p>3. Promosi dan KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang</p> <p>4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Kordinasi Desa (Rakordes) dan Minilokakarya (Minilok)</p> <p>5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluhan KKBPK</p> <p>6. Pengendalian Program KKBPK</p>
			<p>1. Penyediaan Sarana pendukung operasional PKB/PLKB</p>



		<p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas lapangan KB ( PKB/PLKB)</p>	<p>2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)</p>
		<p>2. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/Kota</p>	<p>1. Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</p> <p>2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya</p>
		<p>3. Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan ber-KB</p>	<p>1. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</p> <p>2. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB</p>
4.	<p>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</p>	<p>1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R ,PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarg/UPPKS)</p>



			<p>2. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R ,PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarg/UPPKS)</p> <p>3. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK</p>
--	--	--	---

**B.Keadaan Pemakaian Obat**

Pemakaian obat KB setiap mendapatkan stok baru dari provinsi langsung masuk dalam sistem pencatatan dalam gudang , sedangkan untuk alur pelayanan rutin sewaktu petugas puskesmas ataupun mitra dalam permohonan permintaan obat dibuat format permintaan dan juga laporan bulanan dimana pelayanan yang sudah di lakukan di tingkat puskesmas , RSUD ataupun mitra , setelah itu di buat dalam laporan format F2 dan F5 yang di laporkan ke BKKBN provinsi ( data terlampir).

**C. Sumber dana**

Keuangan / pagu anggaran Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang di berikan oleh pemerintah daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar 9.076.941.291 ( Sembilan Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah )

**Tabel 3.2**  
**Pagu Anggaran**

**Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2022**

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2022	9,076.941.291	-	-	

## BAB IV SUMBER DAYA

### A. Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana

Pengadaan sarana dan prasarana dalam pelayanan keluarga berencana sangatlah penting, terutama pada saat didistribusikan di seluruh distrik se Kabupaten Boven Digoel untuk tahun 2022 pendistribusiannya dilakukan di beberapa distrik saja antara lain Mandobo, Mindiptana, Kombut, Arimop, Jair, Iniyandit, Fofi, Ninati, Kawagit. Untuk jelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel 4.1. Pengadaan sarana dan prasarana keluarga berencana

NO	DISTRIK	BARANG	JUMLAH
1.	Mandobo	Banner Leaflet Poster Spanduk	22 Buah 64 Lembar 305 lembar 70 Buah
2.	Mindiptana	BKB Kit Stunting	1 Set
3.	Kombut	BKB Kit	1 Set
4.	Arimop	BKB Kit	1 Set
5.	Jair	BKB Kit	1 Set
6.	Iniyandit	BKB Kit	1 Set
7.	Fofi	KIT Siap Nikah Anti Stunting	1 Set
8.	Ninati	BKB Kit	1 Set
9.	Kawagit	KIT Siap Nikah Anti Stunting	1 Set

Sumber data : DPPKB 2022

Beberapa situasi fasilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) di wilayah Kabupaten Boven Digoel dapat digambarkan sebagai berikut :

## B. Fasilitas Keluarga Berencana

Untuk peningkatan program KKBPK maka perlu di dukung oleh penyediaan berbagai sarana pelayanan keluarga berencana ,atau Perlengkapan / fasilitas dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.Keadaan perlengkapan yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Boven Digoel dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagaiberikut:

Tabel 4.2  
Jumlah Perangkat Komputer

NO	JENIS PERANGKAT	JUMLAH SATUAN	KETERANGAN
1.	Komputer	10 Unit	
2.	Printer	5 Unit	
3.	Laptop	5 Unit	

Tabel 4.3  
Jumlah Sarana Pendukung

NO	JENIS PERANGKAT	JUMLAH SATUAN	KETERANGAN
1.	Meja kerja Biro	2 Unit	
2.	Meja Kerja stengah Biro	15 Unit	
3.	Kursi Hidrolik	2 Unit	
4.	Kursi Kerja	15 Unit	
5.	Sofa	1 Set	
6.	Lemari Arsip	5 Unit	
	AC	4 Unit	
	TV	2 Unit	
	Kulkas	1 Unit	
	Dispenser	1 Unit	
	Piring , gelas	5 Lusin	

	Mangkuk	4 Lusin	
	Ketel listrik	2 Unit	
	Gorden	15 set	
	Taplak meja	5 set	
	Sapu ijuk, sapu lidi	5 Buah	
	Tempat sampah	8 Buah	
	Tangkai pel	10 Buah	
	Kemoceng/ sula	5 Buah	
	Sikat wc	8 buah	
	Keset kaki, serbet	20 Buah	

Fasilitas yang ada merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana yang tersedia pada DPPKB Kabupaten Boven Digoel, belanja barang/ aset DPPKB diperoleh dari 2 (dua) sumber pembelanjaan yaitu belanja Aset yang lama dan belanja aset baru dari DPPKB Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset DPPKB dari belanja modal DPPKB Kabupaten Boven Digoel, aset lama dan baru yang secara umum terdiri dari :

1. Gedung Alat Kontrasepsi : 1 bangunan
2. Gedung balai penyuluh : 5 bangunan
3. Kendaraan roda 2 : 20 unit
4. Kendaraan Roda 4 : 1 Unit

### C. Keadaan ketenagaan

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel berjumlah 55 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 15 orang CPNS sebanyak 13 orang dan Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak 27 orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 4.4

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TK	Total
PNS	1	7	4	3				15

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

CPNS		13						13
Kontrak		9	7	10				26

Tabel.4.5

Jabatan Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Jabatan	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TK	Total
Struktural	1	5	3	3				12
Fungsional		2	1					3
Staff		13						13

Tabel 4.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah orang
IV.b	1
IV.a	-
III.d	8
III.c	3
III.b	-
III.a	13
II.d	-
II.c	3
II.b	-
II.a	-
Total	28

Tabel 4.7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Jabatan	Perempuan	Laki – Laki	Total
PNS	10	5	15
CPNS	5	8	13
Kontrak	20	7	27

Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur DPPKB belum cukup memadai dibanding dengan bidang tugas yang harus dikerjakan, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih optimal memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, DPPKB Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

## BAB V

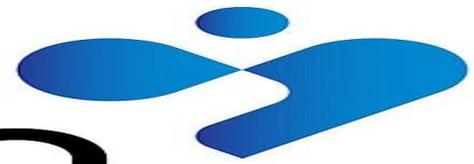
### BIAYA DAN ANGGARAN

#### A. Biaya

Tabel 5.1 Realisasi Kegiatan

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU (Rp)	SUMBER DANA	Realisasi (%)
1.	Sekretariat	7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.461.000	DAU	100%
		8. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.451.411.781	DAU	
		9. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	320.000.000	DAU	
		10. Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.781.510	DAU	
		11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.200.000	DAU	
		12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.500.000	DAU	
2.	Program Pengendalian Penduduk	3. Pemanduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam Rangka	1.200.000.000	DAU	100%

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



		Pengendalian Kuantitas Penduduk			
		4. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	185.085.000	DAK-BOKB	
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	654.515.000	DAK-Non Fisik-BOKB	100%
		5. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	579.383.000	DAK Non Fisik-BOKB	100%
		6. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/Kota	86.597.000	DAK Non Fisik-BOKB	100%
		7. Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah	480.700.000	DAU	100%

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

		kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan ber-KB		
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	927.307.000	DAU dan DAK Fisik-BOKB 100%

#### B. Anggaran

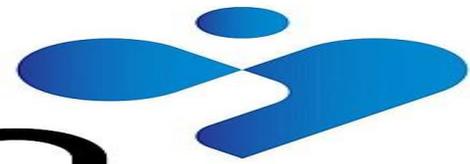
DPPKB Mengelola dua sumber dana yaitu :

1. Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB ( DAK-BOKB)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

## BAB VI PENUTUP

Banyak faktor yang menyebabkan berbagai masalah dan kurang tertariknya masyarakat mensukseskan program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga ( KKBPK ), akar masalah tampaknya terletak pada kenyataan bahwa program KKBPK belum

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BOVEN DIGOEI**



masyarakat yaitu “ *Tanah Papua masih luas* “ . akhirnya beberapa program KKBPK yang penting untuk diselenggarakan terpaksa di tunda atau dilaksanakan kurang optimal .

Keberhasilan program KKBPK di tiap daerah tidak semata - mata di tentukan oleh hasil kerja sektor Kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga saja. Tetapi juga sangat di pengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya maupun secara lintas program sehingga akan didapatkan kontribusi yang lebih valid termasuk informasi data dari setiap lini akan lebih akurat, tidak terjadi perbedaan yang signifikan .

Peningkatan kemajuan program KKBPK bisa di nilai dari indikator yang digunakan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan kesehatan keluarga dan masyarakat yaitu program kependudukan , pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga ( kesehatan lansia, Bina keluarga balita Remaja, PIK-R dan UPPKA, dan program lainnya .

Sistem informasi KKBPK di Kabupaten Boven Digoel masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi program KKBPK secara optimal . hal ini disebabkan arus pengiriman laporan dari tiap petugas kesehatan dan PLKB dari tiap puskesmas belum maksimal dan juga bentuk format standart profil DPPKB dari Provinsi belum kami terima . tetapi demikian diharapkan profil DPPKB ini tetap dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh perubahan keadaan kesehatan masyarakat yang telah dicapai.

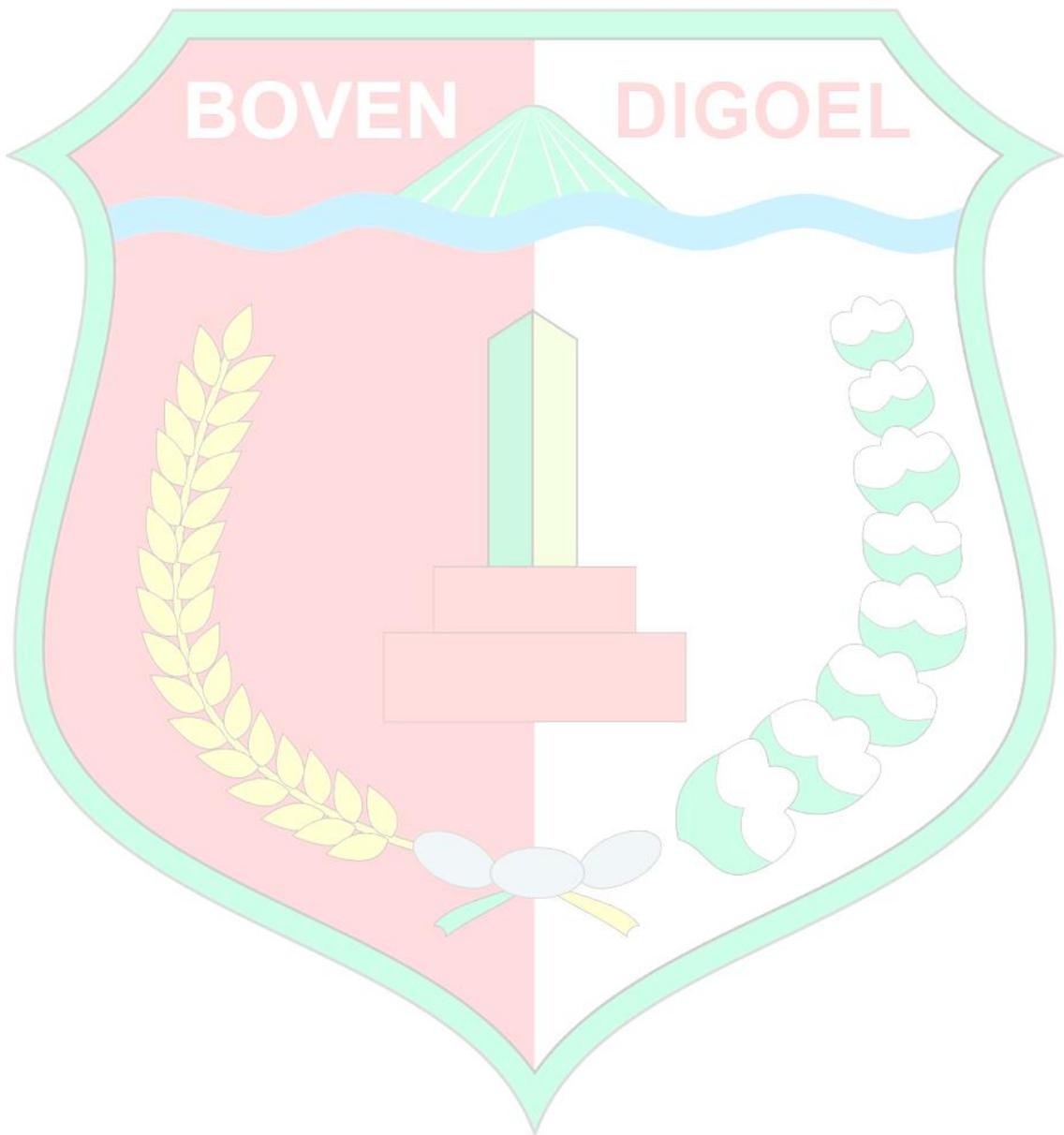
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB  
Kabupaten Boven Digoel

dr. Viviana Maharani Pradotokoesoemo, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19640917 199503 2 001





**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BOVEN DIGOEL**